

Devide Et Impera: Kebijakan Politik Belanda Dalam Memecah Persatuan di Nusantara

Karina¹ Oktavia Sitorus² Salsalina Gurusina³ Rosmaida Sinaga⁴

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: karinarusli0503@gmail.com¹ oktaviatorus09@gmail.com²
salsalinabrgurusina042@gmail.com³ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Devide et impera (bahasa Latin untuk "pecah belah dan kuasai") adalah strategi politik yang digunakan oleh kekuatan penguasa untuk mempertahankan kontrol mereka atas kelompok atau wilayah yang dikuasai. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mereka tidak dapat bersatu melawan penguasa. Dalam konteks kolonialisme, devide et impera sering diterapkan oleh kekuatan kolonial untuk menjaga dominasi mereka atas wilayah jajahan dengan memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan budaya. Dalam sejarah kolonialisme, khususnya di Afrika dan Asia, kekuatan kolonial seperti Inggris dan Belanda memanfaatkan kebijakan ini untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan membangkitkan persaingan antar suku atau kelompok etnis, penguasa kolonial berhasil mencegah terbentuknya gerakan perlawanan yang kuat dan terorganisir. Penerapan devide et impera memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan politik di wilayah pascakolonial. Di banyak negara bekas jajahan, warisan kebijakan ini masih terasa dalam bentuk ketegangan etnis dan politik yang terus berlanjut. Dalam analisis kontemporer, strategi ini masih dipelajari dalam konteks geopolitik dan hubungan internasional, di mana aktor-aktor politik global memanfaatkan perpecahan untuk menjaga pengaruh dan kekuasaan mereka di berbagai wilayah dunia.

Kata Kunci: Devide et Impera, Strategi Politik, Kolonialisme, Perpecahan Sosial, Geopolitik

Abstract

Divide et impera (Latin for "divide and rule") is a political strategy used by ruling powers to maintain their control over controlled groups or territories. This strategy aims to create divisions between community groups, so that they cannot unite against control. In the context of colonialism, divide et impera was often applied by colonial powers to maintain their domination over colonial territories by exploiting ethnic, religious and cultural differences. In the history of colonialism, especially in Africa and Asia, colonial powers such as England and the Netherlands used this policy to maintain their power. With increasing competition between tribes or ethnic groups, the colonial authorities succeeded in preventing the formation of a strong and organized resistance movement. The application of divide et impera has a significant impact in shaping social and political dynamics in postcolonial areas. In many former colonial countries, the legacy of these policies is still felt in the form of ongoing ethnic and political tensions. In contemporary analysis, this strategy is still studied in the context of geopolitics and international relations, where global political actors exploit divisions to maintain their influence and power in various regions of the world.

Keywords: Devide et Impera, Political Strategy, Colonialism, Social Divisions, Geopolitics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Devide et Impera merupakan kombinasi strategi orang Belanda dalam hal politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang telah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok – kelompok kecil untuk

Bersatu menjadi sebuah kelompok – kelompok yang lebih kuat. . Kebijakan "Devide et Impera" atau "pecah belah dan kuasai" menjadi salah satu strategi paling efektif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Nusantara. Dengan latar belakang daerah kepulauan yang beragam suku, budaya, dan agama, Belanda memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk melemahkan kekuatan lokal dan memperkuat kendali kolonial. Kebijakan ini tidak hanya sukses dalam menghambat upaya persatuan di kalangan kerajaan-kerajaan lokal, tetapi juga menciptakan warisan panjang ketidakpercayaan antar komunitas yang berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda di Nusantara, kebijakan politik yang paling menonjol dan efektif dalam mempertahankan kekuasaan kolonial adalah strategi *devide et impera*, atau politik pecah belah. Kebijakan ini diterapkan dengan memanfaatkan perbedaan etnis, agama, serta politik di antara kerajaan-kerajaan dan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah munculnya persatuan yang dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan Belanda, yaitu dengan cara mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lain., Belanda mampu mengontrol wilayah Nusantara yang sangat luas dan beragam tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara berlebihan. Kebijakan ini tidak hanya berhasil memperkuat dominasi kolonial, tetapi juga meninggalkan dampak panjang yang mempengaruhi tatanan politik dan sosial Indonesia hingga masa kemerdekaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian artikel yang berjudul “ Devide Et Impera: Kebijakan Politik Belanda Dalam Memecah Persatuan Di Nusantara” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi literatur. Sumber-sumber dari penulisan artikel ini di dukung seperti Google Scholar, Buku dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Devide et Impera, atau politik pecah belah, merupakan salah satu kebijakan politik Belanda yang sangat efektif dalam mempertahankan kekuasaannya di Nusantara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memecah persatuan antarkerajaan atau kelompok etnis lokal di Indonesia sehingga Belanda dapat lebih mudah menguasai wilayah tersebut. Dengan menciptakan konflik atau perpecahan antar penguasa lokal, Belanda bisa memainkan peran sebagai "penengah" atau "pihak netral" yang pada akhirnya mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Di antara strategi yang paling menonjol adalah mengadu domba antara kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Banten, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Nusantara. Ketika terjadi perselisihan, Belanda akan memberikan bantuan kepada salah satu pihak, namun dengan syarat bahwa pihak yang dibantu harus memberikan konsesi politik atau ekonomi, seperti menyerahkan wilayah, atau memberikan hak dagang istimewa kepada Belanda. Dengan cara ini, Belanda berhasil mempertahankan kontrol dan kekuasaannya selama berabad-abad. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan pada masyarakat lokal dengan menggarisbawahi perbedaan etnis, agama, dan budaya, sehingga tercipta jarak sosial yang lebih besar. Belanda secara sengaja memperuncing konflik ini agar rakyat sulit untuk bersatu melawan penjajahan. Strategi ini membuat Belanda tidak perlu mengerahkan kekuatan militer yang besar, karena perpecahan yang sudah terjadi di antara para penguasa lokal dan rakyat membuat mereka sibuk dengan konflik internal. Kebijakan Devide et Impera menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa Nusantara, yang kaya dan memiliki banyak kerajaan besar, tidak mampu bersatu untuk melawan penjajahan Belanda hingga abad ke-20. Warisan kebijakan ini bahkan masih dapat dirasakan hingga kini, di mana isu-isu kesukuan dan agama masih menjadi tantangan dalam upaya membangun persatuan bangsa Indonesia.. Kebijakan divide et impera (pecah belah dan kuasai) adalah strategi politik yang

diterapkan oleh kolonial Belanda untuk mempertahankan dominasi mereka di Nusantara. Prinsip dari kebijakan ini adalah memecah persatuan di antara kerajaan- kerajaan, kelompok-kelompok etnis, dan masyarakat lokal agar tidak ada kekuatan besar yang dapat melawan kekuasaan kolonial.

Latar Belakang Penerapan Divide et Impera

Sejak kedatangan mereka di Nusantara pada awal abad ke-17, Belanda, melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), mulai mengembangkan kekuatan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Pada awalnya, tujuan utama mereka adalah untuk menguasai jalur perdagangan rempah- rempah yang sangat menguntungkan. Namun, seiring waktu, VOC menyadari bahwa dominasi ekonomi saja tidak cukup untuk mengamankan posisi mereka di Nusantara. Mereka perlu mengendalikan kekuasaan politik dan militer di wilayah-wilayah yang mereka anggap strategis. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menyadari bahwa persatuan di antara kerajaan- kerajaan lokal dan masyarakat bisa menjadi ancaman besar. Banyak kerajaan besar di Nusantara, seperti Mataram, Banten, dan Gowa, memiliki kekuatan militer dan pengaruh yang luas. Oleh karena itu, Belanda memutuskan untuk memanfaatkan perpecahan di antara mereka.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan divide et impera diterapkan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Memanfaatkan Konflik Internal. Belanda sering kali memperparah konflik internal yang sudah ada di kerajaan-kerajaan lokal. Misalnya, dalam konflik suksesi di kerajaan-kerajaan besar, Belanda sering memberikan dukungan kepada salah satu pihak untuk memperlemah lawan. Contohnya, dalam Kerajaan Mataram, Belanda terlibat dalam konflik suksesi pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Dengan mendukung salah satu pangeran, Belanda berhasil memperlemah Mataram dan akhirnya menguasai wilayah tersebut.
2. Membangun Aliansi dengan Penguasa Lokal. Selain memperparah konflik internal, Belanda juga membangun aliansi dengan penguasa- penguasa kecil. Mereka memberikan perlindungan kepada penguasa lokal yang bersedia bekerja sama dan memberikan konsesi perdagangan atau wilayah. Hal ini menciptakan ketergantungan penguasa lokal pada Belanda dan melemahkan posisi kerajaan besar yang ada.
3. Menyebarkan Diskriminasi dan Fragmentasi Sosial. Belanda juga memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan sosial yang ada di masyarakat Nusantara. Mereka membagi masyarakat berdasarkan etnis, seperti pribumi, Tionghoa, dan orang Eropa, serta memperlakukan mereka dengan kebijakan yang berbeda-beda. Tindakan ini menciptakan perpecahan di dalam masyarakat yang memperlemah potensi terjadinya pemberontakan besar- besaran.

Dampak Kebijakan Divide et Impera

Penerapan divide et impera berhasil memperpanjang kekuasaan Belanda di Nusantara selama lebih dari tiga abad. Meskipun terjadi beberapa pemberontakan lokal, seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh, tidak ada satu kekuatan pun yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara untuk melawan Belanda secara efektif. Kelemahan politik dan militer kerajaan-kerajaan lokal akibat perpecahan inilah yang menjadi salah satu alasan utama keberhasilan kolonialisme Belanda di wilayah tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga meninggalkan warisan jangka panjang dalam bentuk fragmentasi sosial dan politik di Indonesia. Perpecahan yang diciptakan oleh Belanda tidak hanya terbatas pada era kolonial, tetapi terus berlanjut hingga masa pasca-kemerdekaan. Konflik etnis, agama, dan politik yang muncul di berbagai daerah di Indonesia bisa dilacak kembali ke masa kolonial ketika Belanda dengan sengaja memecah belah masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.

KESIMPULAN

Kebijakan divide et impera yang diterapkan Belanda di Nusantara adalah salah satu strategi paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan mereka selama masa kolonial. Dengan memanfaatkan konflik internal, membangun aliansi dengan penguasa lokal, dan menciptakan perpecahan sosial, Belanda berhasil memperlemah kerajaan-kerajaan besar dan menghambat terjadinya pemberontakan berskala besar. Warisan dari kebijakan ini masih terasa hingga saat ini, dengan adanya berbagai bentuk fragmentasi sosial yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daliman. 2012. Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda. Yogyakarta: Ombak
- Djakariah. 2014. Sejarah Indonesia II. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah/Louis Gottschalk; penerjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Herdiansyah, Wildan. 2010. VOC Negara Dalam Negara. Bogor: PT. Regina Eka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Resink, G.J. 1987. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ricklefs, M.C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salam, Solichin . 1984. Bung Karno Putera Fajar. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia .Jogjakarta: Diva Press.